

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Balfas, Hamud M. *Hukum Pasar Modal Indonesia*. Jakarta: PT. Tatanusa, 2020.
- Berutu, Ali Geno. *Pasar Modal Syariah Indonesia: Konsep dan Produk*. Salatiga: Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M) IAIN Salatiga, 2020.
- Departemen Pengaturan dan Pengembangan Pasar Modal Direktorat Analisis Informasi Pasar Modal. *Buku Saku Pasar Modal*. Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan, 2023.
- Djaja, Benny. *Hukum Perbankan*. Yogyakarta: Penerbit ANDI, 2019.
- Djaja, dan Meliala, S. *Perkembangan Hukum Perdata tentang Orang dan Hukum Keluarga*. Bandung: Nuansa Aulia, 2019.
- Harahap, Yahya. *Hukum Perseroan Terbatas*. Jakarta: Sinar Grafika, 2018.
- Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia: Ditinjau Menurut Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, Sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, dan Undang-Undang No. 23 Tahun 1999 jo. Undang-Undang No. 3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia, serta Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan*. Jakarta: Prenada Media, 2020.
- HS, Salim. *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*. Jakarta: Sinar Grafika, 2019.
- Khairandy, Ridwan. *Pokok-Pokok Hukum Dagang Indonesia*. Yogyakarta: FH UII Press, 2013.

- Mamudji, Sri. *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*. Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.
- Nicoletti, Bernardo, *Banking 5.0: How Fintech Will Change Traditional Banks in The 'New Normal' Post Pandemic*. Roma: Palgrave Macmillan, 2021.
- Rahmah, Mas. *Hukum Pasar Modal*. Jakarta: Kencana, 2019.
- Setiawan, Agus, dkk. *Konferensi Meja Bundar: Jalan Menuju Terbentuknya Bank Sentral Republik Indonesia*. Jakarta: Bank Indonesia Institute, 2023.
- Soekanto, S., dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*. Jakarta: Rajawali Pers, 2001.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1986.
- Solikin, Nur. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*. Pasuruan: Penerbit Qiara Media, 2021.
- Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: PT Intermasa, 2008.
- Suteki, dan Galang Taufani. *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*. Depok: Rajawali Pers, 2022.
- Tim Penyusun Otoritas Jasa Keuangan. *Buku 2 Perbankan: Seri Literasi Keuangan Perguruan Tinggi*. Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan, 2019.
- Tim Penyusun, *Buku Panduan Tugas Akhir Program Studi Sarjana Hukum*. Semarang: Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 2023.

Artikel dalam Jurnal

- Ariawan, dan Suwinto Johan. "Keterbukaan Informasi UU Pasar Modal Menciptakan *Asymmetric Information* dan *Semi Strong Form*." *Masalah-Masalah Hukum*, no. 1 (January, 2021).
- Handayana, I Gusti Agung Putra, dan I Gusti Ayu Puspawati. "Peran dan Kewenangan Notaris Sebagai Profesi Penunjang Pasar Modal di Indonesia." *Kertha Semaya*, no. 02 (February, 2024).
- Harahap, Agus Salim. "Proses *Initial Public Offering* (IPO) di Pasar Modal Indonesia." *Forum Ilmiah Indonusa*, no. 02 (2011).
- Irfani, Nurfaqih. "Asas Lex Superior, Lex Specialis, dan Lex Posterior: Pemaknaan, Problematika, dan Penggunaannya dalam Penalaran dan Argumentasi Hukum." *Jurnal Legislasi Indonesia*, no. 3 (August 24, 2020).
- Listyawan, Rachel Lavinia. "Urgensi Penerapan Good Corporate Governance Bagi Perseroan Terbatas Terbuka (Studi Kasus PT Tiga Pilar Sejahtera Food TBK)." *Indonesian Notary*, no. 4 (October 12, 2020).
- M. R., Diaz. "Penguatan Bank Perekonomian Rakyat Berbasis Asas Demokrasi Ekonomi: Raradigma Keadilan Sosial." *Jurnal Yustika: Media Hukum Dan Keadilan*, (2023), <https://doi.org/10.24123/yustika.v26i01.6007>
- Mandagi, Vicky Randa Swingly. "Peranan Profesi Penunjang Pasar Modal Sebagai Lembaga Keuangan Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal." *Lex Privatum*, no. 3 (May, 3 2017).
- Murdadi, Bambang. "Kepemilikan Saham Perbankan oleh Asing Sampai 99%, Wow!" *Majalah Ekonomi dan Bisnis*, no. 1 (2015).

Nofrial, Ramon. "Tanggung Jawab Konsultan Hukum Sebagai Profesi Penunjang dalam Mewujudkan Prinsip Keterbukaan di Pasar Modal." *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, no. 1 (2015).

Pratiwi, Indira. "Perlindungan Hukum Bagi Investor dalam Pelaksanaan Transaksi Saham dengan Sistem Perdagangan Online Trading." *Dharmasiswa* (January, 2023).

Rahmiati, Rahmiati. "Perlindungan Hukum Bank Kustodian Terhadap Investor Sebagai Lembaga Penunjang Pasar Modal (PPM) di Indonesia Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal." *Jurnal Hukum Pelita*, no. 1 (May 25, 2023).

Ramadani, Lalu Ahmad. "Oversubscribed, Undersubscribed, dan Initial Public Offering (IPO) Saham Syariah di Indonesia." *Journal of Enterprise and Development (JED)*, no. 1 (June 17, 2020), <https://doi.org/10.20414/jed.v2i01.2045>

Swasana, Rizky Dea Alih, dkk. "Analisis Kebijakan Kepemilikan Asing Pada Sektor Perbankan di Indonesia Terhadap Ketahanan Ekonomi Negara." *Jurnal Kajian Strategik Ketahanan Nasional*, no. 1 (January 1, 2019).

Utami, Annisa, dkk. "Strategi Pengembangan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah di Indonesia." *AL-MUZARA'AH*, no. 1 (June, 26 2023), <https://doi.org/10.29244/Agro-Maritim.040416>

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1999 tentang Pembelian Saham Bank Umum.

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 1992 tentang Bank Perkreditan Rakyat.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 tentang Daftar Bidang Usaha Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Pasar Modal.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9 Tahun 2023 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 62/POJK.03/2020 tentang Bank Perkreditan Rakyat.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 41/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/POJK.04/2021 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 62/POJK.03/2020 tentang Bank Perkreditan Rakyat.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 68/POJK.04/2017 tentang Penilai.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 58/POJK.04/2017 tentang Penyampaian Pernyataan Pendaftaran atau Pengajuan Aksi Korporasi Secara Elektronik.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 8/POJK.04/2017 tentang Bentuk dan Isi Prospektus dan Prospektus Ringkas dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 7/POJK.04/2017 tentang Dokumen Pernyataan Pendaftaran dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 56/POJK.03/2016 tentang Kepemilikan Saham Bank Umum.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29/POJK.04/2016 tentang Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 27/POJK.03/2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.04/2015 tentang Keterbukaan Atas Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 21/POJK.04/2015 tentang Penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/POJK.03/2015 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 20/POJK.03/2014 tentang Bank Perkreditan Rakyat.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/26/PBI/2006 tentang Bank Perkreditan Rakyat.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/22/PBI/2004 tentang Bank Perkreditan Rakyat.

Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 39/SEOJK.03/2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Bagi Calon Pemegang Saham Pengendali, Calon Anggota Direksi, dan Calon Anggota Dewan Komisaris Bank.

Surat Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia Kep-00066/BEI/09-2022 tentang Perubahan Peraturan Nomor I-E tentang Kewajiban Penyampaian Informasi.

Surat Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia Kep-00101/BEI/12-2021 tentang Perubahan Peraturan Nomor I-A tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham yang Diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat.

Surat Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia Nomor Kep-00088/BEI/10-2021 tentang Pedoman Partisipan Sistem dalam Menggunakan Sistem *Electronic Indonesia Public Offering* yang Disediakan oleh PT Bursa Efek Indonesia.

Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia Nomor Kep-00061/BEI/07-2021 tentang Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas yang mewajibkan anggota bursa efek untuk melakukan transaksi di bursa melalui JATS.

Peraturan KSEI No. II-A tentang Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas di KSEI

Rancangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah.

Putusan

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 32/PUU-XX/2022 tentang Pembedaan Kegiatan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah dengan Bank Umum Konvensional dan Bank Umum Syariah.

Internet

Asia Matters for America, “Rural Banks in the Philippines Open Up to Foreign Investors” <https://asiamattersforamerica.org/articles/rural-banks-in-the-philippines-open-up-to-foreign-investors>, diakses 27 April 2024.

Bisnis, “Kronologi Kasus Bank Bangkrut hingga Izin Dicabut OJK” <https://finansial.bisnis.com/read/20231206/90/1721311/kronologi-kasus-bank-bangkrut-hingga-izin-dicabut-ojk> diakses pada 7 Maret 2024.

BPR Kredit Mandiri Indonesia, “Peluncuran Logo Baru BPR Kredit Mandiri Indonesia” <https://kreditmandiri.co.id/artikel/peluncuran-logo-baru-bpr-kredit-mandiri-indonesia>, diakses 27 April 2024.

CNBC, “BPR Ganti Jadi Bank Perekonomian Rakyat, Ini Artinya!” <https://www.cnbcindonesia.com/market/20230524091911-17-440042/bpr-ganti-jadi-bank-perekonomian-rakyat-ini-artinya> diakses pada 11 Maret 2024.

Infobanknews, “Sinergi Bank Umum dan BPR di Era Digitalisasi Layanan” <https://infobanknews.com/sinergi-bank-umum-dan-bpr-di-era-digitalisasi-layanan/>, diakses 27 April 2024.

Kontan, “BPR Kredit Mandiri Indonesia Siap-siap untuk Melakukan IPO” <https://keuangan.kontan.co.id/news/bpr-kredit-mandiri-indonesia-siap-siap-untuk-melakukan-ipo>, diakses 27 April 2024.

Otoritas Jasa Keuangan, “Perkembangan Aset/Kredit/DPK BPR dan BPR Syariah” <https://ibpr-s.ojk.go.id/InformasiUmum>, diakses 7 Maret 2024.

Otoritas Jasa Keuangan, “Rural Bank” <https://ojk.go.id/en/kanal/perbankan/Pages/Bank-Perkreditan-Rakyat.aspx>, diakses 26 Mei 2024.

The BFT Online, “The Future of Rural Banking: Achieving Impact and Developing Rural Society,” <https://thebftonline.com/2022/12/12/the-future-of-rural-banking-achieving-impact-and-developing-rural-society/#>, diakses 27 April 2024.

The Philippine Star, “New Law Allows Foreigners to Own 60% of Rural Banks”

<https://www.philstar.com/business/2013/05/30/947802/new-law-allows-foreigners-own-60-rural-banks>, diakses pada 27 April 2024.